

---

---

## Analisis Kendala-Kendala Praktis Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

### (Studi Kasus Pembangunan Rumah Swadaya di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

<sup>1</sup>Gilang Alfisyar Ramadhany <sup>2</sup>Hasti Suprihatin

<sup>1,2</sup> Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gresik

Email: <sup>1</sup>[ramadhanyalfisyar@gmail.com](mailto:ramadhanyalfisyar@gmail.com), <sup>2</sup>[hasi.suprihatin007@gmail.com](mailto:hasi.suprihatin007@gmail.com)

#### Abstract

*The Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) is a government effort to help low-income communities (MBR) obtain habitable houses through the renovation of uninhabitable houses. This study aims to analyze the practical obstacles in the implementation of the BSPS program in Pagu Village, Wates District, Kediri Regency, East Java. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of field observations, interviews with beneficiaries, and documentation studies. The results of the study indicate several major obstacles in the implementation, including: lack of technical socialization to workers, use of building materials that do not meet specifications, unpredictable weather, and unpreparedness of aid recipients in fulfilling self-help components. In addition, construction practices were also found that did not comply with technical standards, such as the distance between stirrups that exceeded the limit, structural joints without anchors, and foundation dimensions that did not comply with BSPS guidelines. To increase the effectiveness of program implementation, it is necessary to increase technical training for workers, comprehensive socialization to aid recipients, and periodic supervision by related parties so that the houses built truly meet the eligibility standards.*

**Keywords:** BSPS, implementation obstacles, Pagu Village, self-help houses, technical standards.

#### Pendahuluan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan atau peningkatan rumah swadaya. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah mereka. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan program BSPS di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program ini adalah Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana program ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, kenyataannya masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program, seperti keterlambatan distribusi material, kurangnya tenaga kerja terampil, hingga kendala koordinasi antara pendamping teknis dan masyarakat. Kasus pada pembangunan rumah swadaya di Desa Pagu ini menjadi sangat penting, karena mencerminkan berbagai persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi serta menyempurnakan pelaksanaan program BSPS secara lebih luas di daerah lain. Artikel ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk membahas permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasinya melalui program BSPS. Meskipun program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah utama yang muncul adalah pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana teknis, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta keterlambatan dalam proses pembangunan. Untuk memahami lebih dalam faktor-faktor penghambat tersebut, penelitian ini dilakukan

dengan studi kasus pembangunan rumah swadaya di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala-kendala praktis yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di lokasi tersebut, agar dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam implementasi program di masa yang akan datang.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun secara konsep program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan gotong royong dalam pembangunan perumahan, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala praktis. Studi ini berfokus pada analisis kendala-kendala tersebut dalam konteks pelaksanaan BSPS di Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, serta implikasinya terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan rumah swadaya.[1]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, program ini menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterlambatan dalam proses pembangunan. Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan, tetapi juga mencerminkan adanya tantangan dalam tata kelola program bantuan pemerintah di daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, hingga partisipasi masyarakat penerima manfaat.[2]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak. Melalui pendekatan partisipatif, program ini bertujuan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan rumah, dengan dukungan dana stimulan serta pendampingan teknis. Pelaksanaan BSPS tidak hanya mencerminkan upaya pemenuhan hak atas perumahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan program ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan MBR.[3]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan rumah layak huni melalui bantuan stimulan. Di Kota Langsa, Provinsi Aceh, implementasi BSPS menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mekanisme penyaluran bantuan, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknis dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil diterapkan secara optimal di tingkat lokal serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.[4]

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan layak huni merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya melalui bantuan stimulan. Di Desa Kantanan, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol, program ini menjadi salah satu intervensi strategis dalam mengatasi permasalahan perumahan. Implementasi program BSPS di wilayah ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan.[5]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan rumah secara swadaya dengan dukungan stimulan dari pemerintah. Di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan program BSPS menjadi penting untuk dievaluasi guna mengetahui efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup

penerima bantuan. Evaluasi ini diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan optimalisasi program di masa mendatang.[6]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan partisipatif dan swadaya. Namun, dalam implementasinya di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasaman, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan program. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari aspek teknis, administratif, sosial, hingga kelembagaan. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor penghambat pelaksanaan BSPS menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan optimalisasi program di tingkat daerah.[7]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan bantuan stimulan berupa dana kepada penerima manfaat agar dapat memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya. Pelaksanaan program BSPS memiliki peran strategis dalam mewujudkan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada proses pelaksanaan di tingkat lokal, seperti di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan BSPS berjalan di wilayah tersebut, termasuk tantangan dan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan pelaksanaan program serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan.[8]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan stimulan berupa bahan bangunan. Implementasi program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya perumahan yang layak dan sehat secara mandiri oleh masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan program BSPS di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dengan tujuan menganalisis proses, kendala, serta dampak yang ditimbulkan dari program tersebut terhadap kondisi perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi program BSPS dan rekomendasi untuk peningkatan program di masa mendatang.[9]

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hunian melalui bantuan stimulan berupa bahan bangunan yang diberikan kepada penerima manfaat. Penelitian mengidentifikasi proses pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat, kendala yang dihadapi, serta dampak program terhadap kondisi fisik rumah dan kesejahteraan sosial-ekonomi penerima. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program BSPS secara umum berhasil membantu perbaikan rumah dengan partisipasi aktif masyarakat, namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan dana, pemahaman program, dan koordinasi antar pihak terkait. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan agar program lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.[10]

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kendala-kendala praktis dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Fokus penelitian mencakup prinsip perencanaan teknis program BSPS, standar teknis pembangunan rumah swadaya, dan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan penerima bantuan dan pelaksana teknis, serta dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola permasalahan, ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan pedoman teknis, serta dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan pelaksanaan BSPS di masa mendatang, khususnya dalam konteks wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya.

**Pengumpulan Data:**

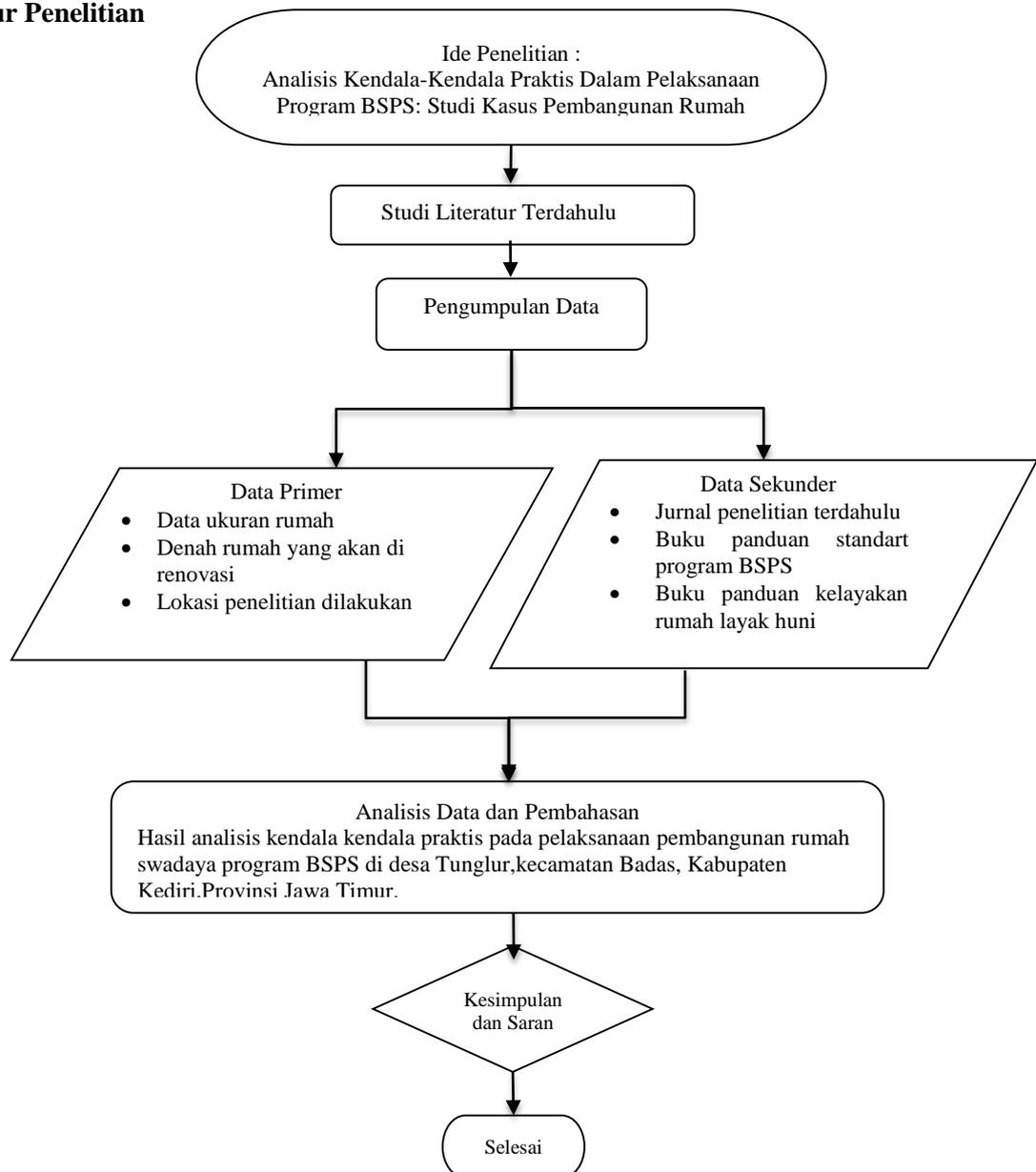
1. Data Primer : Observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata pelaksanaan program BSPS. Dengan jumlah unit rumah sebagai sampel studi kasus adalah 41 unit rumah.
2. Data Sekunder : Dokumentasi dan studi literatur terkait program BSPS dan standar teknis pembangunan rumah swadaya.

**Standar Teknis Pembangunan Rumah Swadaya:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, standar teknis pembangunan rumah swadaya diwajibkan mencakup:

- Keselamatan Bangunan: Struktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keamanan penghuni.
- Kesehatan: Rumah harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai untuk mendukung kesehatan penghuni.
- Kenyamanan: Tata ruang dan luas bangunan harus sesuai dengan kebutuhan dasar penghuni.

**Diagram Alur Penelitian**



**Gambar 1.** Diagram Alur Penelitian  
(Sumber : Olahan Peneliti, 2025)

## Hasil dan Pembahasan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dari Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh rumah layak huni. Program ini bukan membangun rumah dari nol, tetapi lebih kepada renovasi rumah tidak layak huni agar memenuhi standar kelayakan yang mengacu pada :

- UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 54 ayat (3) huruf b Pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan bagi MBR antara lain berupa stimulan rumah swadaya
- PP No. 14 Tahun 2016 Jo. PP No. 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (2) Stimulan Rumah Swadaya berupa perbaikan dan pembangunan baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
- Perpres No. 18 Tahun 2020 Lampiran III Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024
- Permen No 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
- SE Dirjen Perumahan No. 14/ 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbagi dalam empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp 20 juta per unit rumah, dengan alokasi Rp 17,5 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja. Apabila total biaya renovasi atau pembangunan melebihi jumlah bantuan yang diberikan, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima manfaat melalui mekanisme swadaya masyarakat.

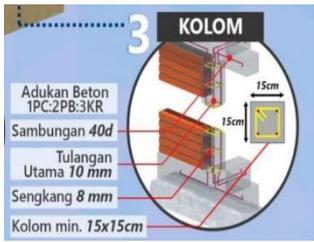
Pada tahun 2024, Desa Pagu yang terletak di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tercatat sebagai salah satu lokasi penerima manfaat program BSPS, dengan jumlah penerima sebanyak 41 rumah tangga. Namun demikian, implementasi program di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan. Permasalahan yang muncul antara lain keterlambatan pengiriman material, terbatasnya pendampingan teknis dari fasilitator, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai standar teknis bangunan yang ditetapkan dalam regulasi BSPS. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan keterbatasan akses wilayah juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kendala-kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan realitas pelaksanaan di tingkat tapak, yang memerlukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan sistem pengawasan dan pembinaan teknis guna menjamin keberhasilan program secara berkelanjutan. Adapun kendala teknis spesifik yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis kepada tukang bangunan mengenai pedoman pelaksanaan pembangunan rumah swadaya sesuai standar program BSPS.
2. Kebiasaan tukang bangunan yang lebih mengandalkan pengalaman pribadi, tanpa mengacu pada standar teknis dan gambar kerja yang telah disusun.
3. Pemasangan komponen struktural yang tidak sesuai standar teknis, antara lain:
  - Jarak antar sengkang melebihi 15–20 cm, yang dapat mengurangi kekuatan struktur penulangan.
  - Tidak adanya pemasangan angkur pada sambungan kolom dan sloof, maupun pada sambungan kolom dan balok, sehingga mengurangi ketahanan struktur terhadap beban gempa.
  - Dimensi pondasi tipe cakar ayam yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pedoman teknis program BSPS.
  - Sambungan antara sloof dan kolom yang tidak tepat atau tidak memiliki pengunci yang cukup.
  - Koneksi antara tulangan ring balok dan kolom yang tidak terpenuhi secara struktural.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi indikasi lemahnya pengawasan teknis serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, agar pelaksanaan program BSPS tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga menjamin kualitas dan ketahanan bangunan yang dibangun.

Berikut pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis BSPS yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 1. Hasil Temuan Di Lapangan

No	Standart Rencana Teknis	Temuan Di lapangan	Analisis
1	 <p><b>1 FONDASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angkur Pondasi</li> <li>Batu Belah Pondasi</li> <li>Anstamping /Batu kosong</li> <li>Lapisan pasir</li> </ul>		Masih banyak di temukan dimensi pondasi tidak sesuai aturan / petunjuk teknis
2	 <p><b>2 SLOOF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adukan Beton 1PC:2PB:3KR</li> <li>Sambungan 40d</li> <li>Tulangan Utama 10 mm</li> <li>Sengkang 8 mm</li> <li>Sloof min. 15x20cm</li> </ul>		Ditemukan sambungan antara sloof dan kolom yang masih belum sesuai aturan
3	 <p><b>3 KOLOM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adukan Beton 1PC:2PB:3KR</li> <li>Sambungan 40d</li> <li>Tulangan Utama 10 mm</li> <li>Sengkang 8 mm</li> <li>Kolom min. 15x15cm</li> </ul>		Ditemukan Jarak sengkang antar begel yang melebihi 15 cm
4	 <p><b>4 RING BALOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adukan Beton 1PC:2PB:3KR</li> <li>Balok min. 12x15cm</li> <li>Sambungan 40d</li> <li>Tulangan Utama 10 mm</li> <li>Sengkang 8mm</li> </ul>		Ditemukan Koneksi/sambungan antara ring balok dan gewel yang masih belum sesuai aturan
5	 <p><b>5 ATAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuda-kuda atap</li> <li>Ikatan Angin</li> <li>Dinding Ampig &amp; Bingkai beton</li> <li>Penutup Atap</li> </ul>		Ditemukan bentuk kuda kuda yg salah dan tidak sesuai aturan

(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025)

**Hasil Temuan Penelitian:**

Penelitian sebelumnya di Desa Pagu mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan program BSPS, antara lain:

**Tabel 2.** Hasil analisis kendala di lapangan

No	Kendala di lapangan	Analisis	Dampak	Solusi
1	Material Bangunan Tidak Sesuai Spesifikasi	Penggunaan bahan bangunan tidak memenuhi standar teknis.	Bangunan cepat rusak dan tidak memenuhi standar kelayakan huni.	Pengawasan ketat terhadap pengadaan dan distribusi material.
2	Cuaca yang Tidak Menentu	Hujan sering menyebabkan keterlambatan pembangunan.	Proyek tidak selesai tepat waktu; biaya tambahan akibat perpanjangan waktu kerja.	Penjadwalan pembangunan menyesuaikan musim serta penyediaan pelindung kerja.
3	Ketidaksiapan Penerima Bantuan	Penerima bantuan belum siap memberikan kontribusi swadaya.	Proses pembangunan terhambat atau terhenti.	Sosialisasi dan pendampingan awal untuk memastikan kesiapan penerima.
4	Kurangnya Pengetahuan Tukang Bangunan	Tukang bangunan tidak memahami standar teknis pembangunan.	Kualitas bangunan rendah, potensi risiko keselamatan bagi penghuni.	Pelatihan dan sertifikasi bagi tukang bangunan lokal.

(Sumber : Hasil temuan Peneliti, 2025)

Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan pelaksanaan program BSPS di Desa Pagu dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

**Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pembangunan rumah swadaya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini meliputi:

1. Material swadaya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga kualitas bangunan menjadi kurang optimal.
2. Kondisi hujan yang terus menerus, terutama hujan yang sering menyebabkan keterlambatan dalam proses pembangunan.
3. Minimnya dana swadaya dari penerima bantuan untuk menanggung kekurangan biaya renovasi maupun pemahaman tentang standar teknis oleh penerima bantuan.
4. Kurangnya pengetahuan tukang bangunan, di mana banyak pekerja konstruksi yang lebih mengandalkan pengalaman pribadi dibandingkan mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan.

## Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program BSPS, disarankan:

1. Peningkatan Sosialisasi: Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan program BSPS.
2. Pelatihan bagi Tukang: Menyelenggarakan pelatihan bagi tukang bangunan dan tenaga kerja lainnya mengenai standar teknis pembangunan rumah swadaya.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana teknis dan standar yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar dilakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada penerima bantuan serta tukang, sehingga pelaksanaan program BSPS dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan rumah layak huni yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## Referensi

- [1] K. B. Selatan dan K. Bogor, "Analisis Kendala-Kendala Praktis Dalam Pelaksanaan Program BSPS : Studi Kasus Pembangunan Rumah Swadaya Di Kelurahan," vol. 1, no. 1, hal. 1–8, 2020.
- [2] R. A. Daffa, U. A. Aziz, dan L. B. Setyaning, "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Seram Bagian Barat Provinsi Maluku," *Surya Bet. J. Ilmu Tek. Sipil*, vol. 8, no. 1, hal. 48–54, 2024, doi: 10.37729/suryabeton.v8i1.4706.
- [3] Khayu rohmi, "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," *J. Law Adm. Sci.*, vol. 1, no. 2, hal. 38–50, 2023, doi: 10.33478/jlas.v1i2.11.
- [4] R. Di, K. Langsa, P. Aceh, A. Tim, T. Tenaga, dan P. Dana, "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH Zulfikar 1), Matius Bangun 2)," 1945.
- [5] J. Polinggapo, S. I. Mahmud, U. Gorontalo, dan S. Mujahidin, "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) di Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol," vol. 5, hal. 2435–2444, 2025.
- [6] R. Widayanti, "Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatn Tulungagung Kabupaten Tulungagung," hal. 1–7, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://www.pu.go.id/m/main>
- [7] E. Rita, K. Amri, dan Wahyudi, "Kajian Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya," *e-Jurnal Bung Hatta*, hal. 2–3, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <http://repo.bunghatta.ac.id/2343/>
- [8] J. Ilmiah dan W. Pendidikan, "5355-Article Text-16665-1-10-20231107 (2)," vol. 9, no. November, hal. 409–417, 2023.
- [9] P. Swadaya dan B. Di, "Implementasi Program Bantuan Stimulan," vol. 7, no. November, hal. 6836–6850, 2019.
- [10] P. Studi, I. Administrasi, U. Nusa, dan C. Kupang, "EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ( BSPS ) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KELURAHAN OESAPA KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG," vol. 3, no. 2003, 2025.